

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
(LKPP)**

**Nota Dinas**

Nomor : 14715/Ses.1/07/2025

Yth. : Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
Dari : Plt. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan  
Hal : Penyampaian Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Periode Juni Tahun 2025  
Tanggal : 18 Juli 2025

---

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode bulan Juni Tahun 2025, dengan ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pada pelaporan bulan Juni 2025, kinerja LKPP pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan Juni 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp56.564.597.231 (33.93%).
3. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025. Untuk mengoptimalkan anggaran dan mendukung pencapaian target saat ini LKPP telah mengajukan permohonan relaksasi anggaran blokir efisiensi pada DIPA LKPP TA. 2025 ke Kementerian Keuangan sebesar Rp34.696.548.000.
4. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mulai tahun 2024 pelaporan capaian Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi salah satu komponen penilaian pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya dilaporkan setiap akhir tahun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, oleh karena itu NKA LKPP belum dapat disajikan pada laporan bulanan ini.
5. Berkaitan dengan hal-hal diatas, untuk meningkatkan kinerja dan anggaran LKPP diharapkan setiap Unit Organisasi agar:
  - a. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi;
  - b. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ );
  - d. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala.
6. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Kementerian PAN-RB, setiap unit organisasi agar mengoptimalkan aplikasi SiREMON untuk digunakan dalam pengendalian, evaluasi dan pelaporan kinerja dan anggaran unit organisasinya masing-masing.

Dalam hal membutuhkan penjelasan dan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi kami melalui Sdri. Resa Anggriani (0819-3209-6526). Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Dokumen ini adalah dokumen yang sah dan telah ditandatangani secara elektronik melalui e-Office LKPP. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dalam dokumen ini dan pastikan anda diarahkan ke alamat <https://eoffice.lkpp.go.id>

Tembusan :

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
3. Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital
4. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
5. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah





**LKPP**  
Lembaga Kebijakan  
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

# LAPORAN

## MONITORING & EVALUASI KINERJA UNIT ORGANISASI

Periode Bulan Juni

**TAHUN  
2025**

**BIRO PERENCANAAN  
DAN KEUANGAN**

Gedung LKPP Lt 9  
Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jalan Epicentrum Tengah Lot 11 B, Kota  
Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota  
Jakarta

021-29935577  
[www.lkpp.go.id](http://www.lkpp.go.id)



# SUMMARY

## CAPAIAN FISIK LEMBAGA



Sasaran Kegiatan

25 | 89

Sasaran Kegiatan

Indikator



Rincian Output

65

Rincian Output



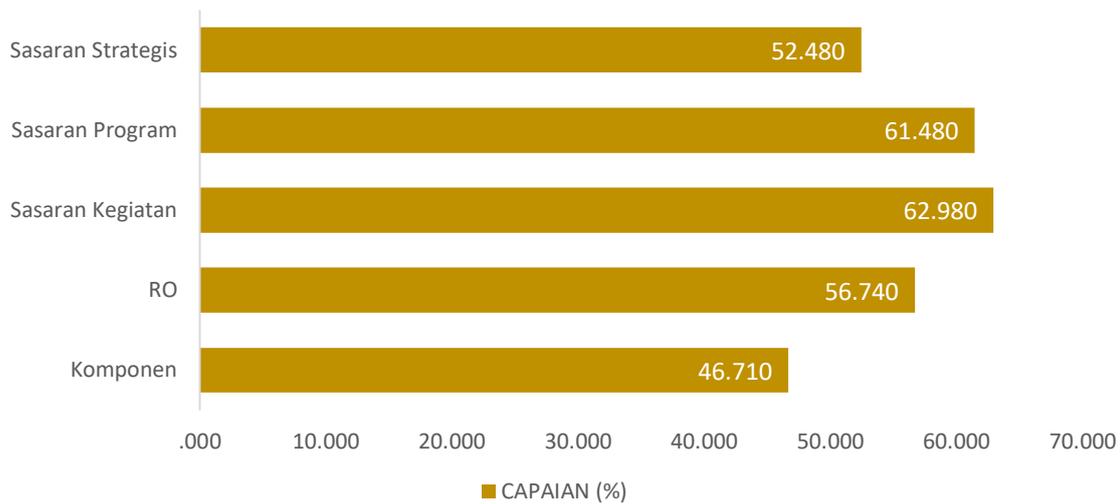
Komponen

177

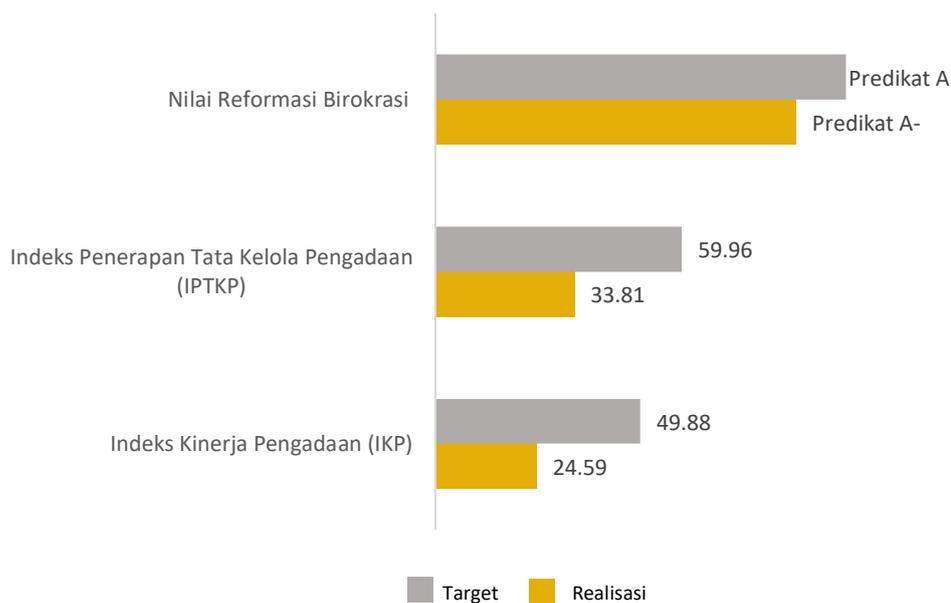
Komponen



### Capaian Fisik



### Sasaran Strategis



# SUMMARY

## Penyerapan Anggaran



**Realisasi Penyerapan Anggaran LKPP TA 2025 berdasarkan aplikasi MonSAKTI**

Per tanggal 30 Juni 2025



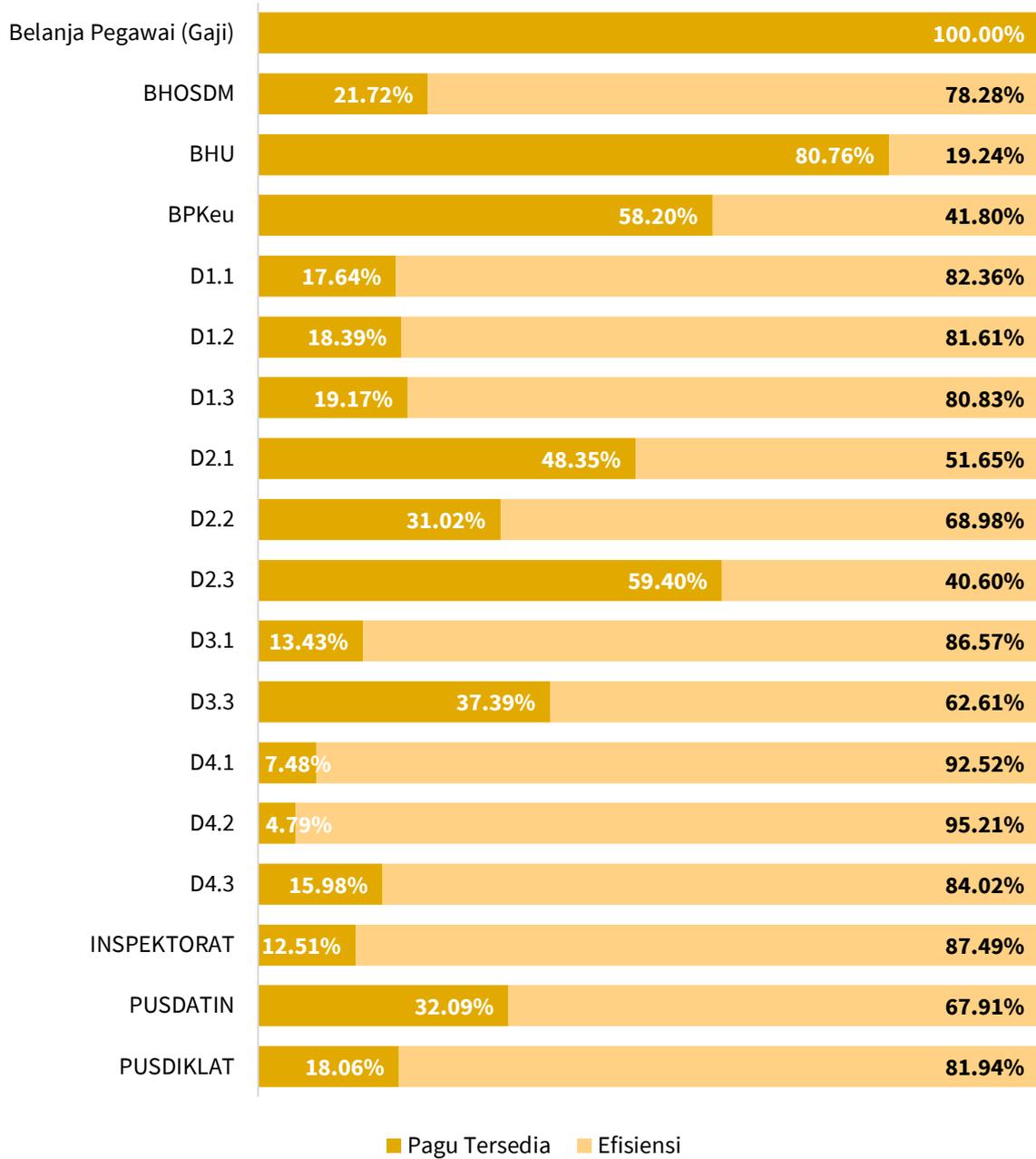
\*Sumber: Aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan RI tanggal 30 Juni 2025

- Penyajian realisasi penyerapan anggaran LKPP dalam pelaporan ini masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.994.000, mengingat sampai saat ini belum terdapat kebijakan atas pengembalian pagu anggaran yang terkena dampak efisiensi.



## Pagu Anggaran dan Efisiensi Per Unit Organisasi Eselon II

Per tanggal 30 Juni 2025





## Realisasi Anggaran Belanja Per Unit Organisasi Eselon II

Per tanggal 30 Juni 2025

Unit Organisasi	Pagu Awal (Rp)*	Efisiensi		Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi		
		Nominal (Rp)	%		Nominal (Rp)	% (6/2)**	% (6/5)***
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>BHOSDM</b>	5.742.195.000	4.494.841.000	78,28%	1.247.354.000	539.919.946	9,40%	43,29%
<b>BHU</b>	44.938.473.000	8.645.334.000	19,24%	36.293.139.000	13.619.549.496	30,31%	37,53%
<b>BPKeu</b>	2.814.109.000	1.176.325.000	41,80%	1.637.784.000	326.659.426	11,61%	19,95%
<b>BPKeu (Gaji)</b>	65.901.318.000	0	0%	65.901.318.000	36.245.232.693	55,00%	55,00%
<b>D1.1</b>	3.170.255.000	2.610.873.000	82,36%	559.382.000	302.003.081	9,53%	53,99%
<b>D1.2</b>	2.100.812.000	1.714.457.000	81,61%	386.355.000	158.554.414	7,55%	41,04%
<b>D1.3</b>	2.598.025.000	2.099.898.000	80,83%	498.127.000	217.837.853	8,38%	43,73%
<b>D2.1</b>	1.963.356.000	1.014.103.000	51,65%	949.253.000	444.768.000	22,65%	46,85%
<b>D2.2</b>	7.521.299.000	5.188.431.000	68,98%	2.332.868.000	1.200.137.496	15,96%	51,44%
<b>D2.3</b>	1.909.723.000	775.388.000	40,60%	1.134.335.000	538.887.870	28,22%	47,51%
<b>D3.1</b>	3.539.260.000	3.063.811.000	86,57%	475.449.000	225.204.520	6,36%	47,37%
<b>D3.3</b>	3.708.029.000	2.321.421.000	62,61%	1.386.608.000	650.067.022	17,53%	46,88%
<b>D4.1</b>	1.944.566.000	1.799.078.000	92,52%	145.488.000	73.272.923	3,77%	50,36%
<b>D4.2</b>	3.060.763.000	2.914.139.000	95,21%	146.624.000	58.844.582	1,92%	40,13%
<b>D4.3</b>	1.984.221.000	1.667.207.000	84,02%	317.014.000	149.849.116	7,55%	47,27%
<b>INSPEKTORAT</b>	927.860.000	811.811.000	87,49%	116.049.000	82.787.399	8,92%	71,34%
<b>PUSDATIN</b>	9.118.948.000	6.192.894.000	67,91%	2.926.054.000	1.405.529.027	15,41%	48,03%

Unit Organisasi	Pagu Awal (Rp)*	Efisiensi		Pagu Tersedia (Rp)	Realisasi		
		Nominal (Rp)	%		Nominal (Rp)	% (6/2)**	% (6/5)***
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>PUSLAT</b>	3.768.782.000	3.088.033.000	81,94%	680.749.000	325.492.367	8,64%	47,81%
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.994.000</b>	<b>49.578.044.000</b>	<b>29,74%</b>	<b>117.133.950.000</b>	<b>56.564.597.231</b>	<b>33,93%</b>	<b>48,29%</b>

Catatan:

- \* Pagu anggaran berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024.
- \*\* Persentase realisasi didapatkan berdasarkan perbandingan Realisasi Belanja Unit Organisasi (6) dengan Pagu Awal (2) LKPP.
- \*\*\* Persentase realisasi didapatkan berdasarkan perbandingan Realisasi Belanja Unit Organisasi (6) dengan Pagu Tersedia setelah Efisiensi (5).

# Perbandingan Rencana Penarikan Dana (RPD) Dengan Realisasi Anggaran

No.	Unit Organisasi	RPD Juni (Rp)	Realisasi Juni (Rp)	Deviasi (Rp)	% Deviasi*
1	2	3	4	5 = (4 - 3)	6 = (5 / 3)
1	BHOSDM	Rp116.075.000	Rp30.299.000	-Rp85.776.000	-73,90%
2	BHU	Rp3.304.629.040	Rp2.491.224.343	-Rp813.404.697	-24,61%
3	BPKEU	Rp54.800.000	Rp3.067.000	-Rp51.733.000	-94,40%
4	BPKEU (Belanja Pegawai)	Rp10.399.935.940	Rp10.531.100.344	Rp131.164.404	1,26%
5	D1.1	Rp36.300.000	Rp29.165.448	-Rp7.134.552	-19,65%
6	D1.2	Rp45.895.000	Rp20.323.241	-Rp25.571.759	-55,72%
7	D1.3	Rp43.722.600	Rp29.219.000	-Rp14.503.600	-33,17%
8	D2.1	Rp80.781.000	Rp45.405.000	-Rp35.376.000	-43,79%
9	D2.2	Rp177.600.000	Rp18.900.000	-Rp158.700.000	-89,36%
10	D2.3	Rp79.215.000	Rp66.670.000	-Rp12.545.000	-15,84%
11	D3.1	Rp34.378.000	Rp13.841.585	-Rp20.536.415	-59,74%
12	D3.3	Rp99.691.781	Rp144.471.902	Rp44.780.121	44,92%
13	D4.1	Rp5.775.495	Rp-	-Rp5.775.495	-100,00%
14	D4.2	Rp6.225.500	Rp-	-Rp6.225.500	-100,00%
15	D4.3	Rp31.238.000	Rp-	-Rp31.238.000	-100,00%
16	Inspektorat	Rp11.212.000	Rp-	-Rp11.212.000	-100,00%
17	PUSDATIN	Rp88.557.300	Rp16.037.600	-Rp72.519.700	-81,89%
18	PPSDM PBJ	Rp54.350.000	Rp78.133.670	Rp23.783.670	43,76%
<b>TOTAL LKPP</b>		<b>Rp14.670.381.656</b>	<b>Rp13.517.858.133</b>	<b>-Rp1.152.523.523</b>	<b>-7,86%</b>

## Catatan:

- \* 1. Ambang batas deviasi antara RPD dengan realisasi adalah sebesar  $\pm 5\%$  untuk nilai maksimum IKPA LKPP;  
 2. Kinerja Unit Organisasi semakin baik bila Persentase Deviasi antara RPD dengan Realisasi Anggaran mendekati 0%.  
 3. Persentase Deviasi bernilai positif (+) jika Realisasi Anggaran lebih besar dari RPD  
 4. Persentase Deviasi bernilai negatif (-) jika Realisasi Anggaran lebih kecil dari RPD  
 5. RPD (3) dan Realisasi Anggaran (4) yang ditampilkan merupakan RPD dan penyerapan anggaran parsial bulan Mei tahun 2024
- Realisasi anggaran diluar ambang batas toleransi deviasi sebesar  $\pm 5\%$   
 ■ Realisasi anggaran masih dalam ambang batas toleransi deviasi sebesar  $\pm 5\%$

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>8</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>11</b>
<b>MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA .....</b>	<b>11</b>
<b>1.1 ANGGARAN .....</b>	<b>11</b>
A.    Pagu Anggaran .....	11
B.    Efisiensi Anggaran.....	12
C.    Anggaran Pasca Efisiensi .....	13
D.    Penyerapan Anggaran .....	17
<b>1.2 PELAPORAN EKSTERNAL .....</b>	<b>18</b>
A.    Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS.....	18
<b>BAB II .....</b>	<b>20</b>
<b>MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI.....</b>	<b>20</b>
<b>2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU) .....</b>	<b>20</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik .....	20
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	21
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	21
D.    Rekomendasi .....	21
<b>2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM).....</b>	<b>23</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik .....	23
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	24
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	24
D.    Rekomendasi .....	24
<b>2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU) .....</b>	<b>25</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik .....	25
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	26
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	26
D.    Rekomendasi .....	26
<b>2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1) .....</b>	<b>28</b>
A.    Capaian Kinerja Fisik .....	28
B.    Capaian Kinerja Anggaran .....	29
C.    Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	29
D.    Rekomendasi .....	29
<b>2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2) .....</b>	<b>30</b>

A.	Capaian Kinerja Fisik .....	30
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	31
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	31
D.	Rekomendasi .....	31
<b>2.6</b>	<b>DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3) .....</b>	<b>32</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	32
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	33
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	33
D.	Rekomendasi .....	34
<b>2.7</b>	<b>DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1).....</b>	<b>35</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	35
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	36
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	36
D.	Rekomendasi .....	37
<b>2.8</b>	<b>DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2).....</b>	<b>38</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	38
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	38
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	39
D.	Rekomendasi .....	39
<b>2.9</b>	<b>DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3) .....</b>	<b>40</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	40
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	41
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	41
D.	Rekomendasi .....	41
<b>2.10</b>	<b>DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1) .....</b>	<b>43</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	43
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	44
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	44
D.	Rekomendasi .....	44
<b>2.11</b>	<b>DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3).....</b>	<b>46</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	46
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	47
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	47

D.	Rekomendasi .....	47
<b>2.12</b>	<b>DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1) .....</b>	<b>49</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	49
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	50
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	50
D.	Rekomendasi .....	50
<b>2.13</b>	<b>DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2) .....</b>	<b>52</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	52
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	53
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	53
D.	Rekomendasi .....	53
<b>2.14</b>	<b>DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3) .....</b>	<b>55</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	55
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	56
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	56
D.	Rekomendasi .....	57
<b>2.15</b>	<b>INSPEKTORAT .....</b>	<b>58</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	58
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	58
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	59
D.	Rekomendasi .....	59
<b>2.16</b>	<b>PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA.....</b>	<b>60</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	60
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	61
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	61
D.	Rekomendasi .....	61
<b>2.17</b>	<b>PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN) .....</b>	<b>63</b>
A.	Capaian Kinerja Fisik .....	63
B.	Capaian Kinerja Anggaran .....	64
C.	Catatan Monitoring dan Evaluasi .....	64
D.	Rekomendasi .....	65
<b>BAB III</b>	<b>.....</b>	<b>66</b>
<b>KESIMPULAN</b>	<b>.....</b>	<b>66</b>
<b>A.</b>	<b>Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B.</b>	<b>Rekomendasi.....</b>	<b>67</b>

## BAB I MONITORING DAN EVALUASI LEMBAGA

### 1.1 ANGGARAN

#### A. Pagu Anggaran

Berdasarkan dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk LKPP TA 2025 dengan Nomor: SP DIPA-106.01-0/2025 tanggal 02 Desember 2024, pagu anggaran LKPP tahun 2025 sebesar Rp166.711.994.000. Adapun komposisi anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	%
<b>51 Belanja Pegawai</b>	65.901.318.000	39,53%
<b>52 Belanja Barang</b>	98.714.391.000	59,21%
<b>53 Belanja Modal</b>	2.096.285.000	1,26%
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.994.000</b>	<b>100%</b>

Adapun pembagian pagu anggaran tersebut ke Unit Organisasi adalah sebagai berikut:

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
<b>SETTAMA</b>	<b>65.901.318.000</b>	<b>53.319.777.000</b>	<b>175.000.000</b>	<b>119.396.095.000</b>
BHOSDM	-	5.682.195.000	60.000.000	5.742.195.000
BPKeu	-	2.814.109.000	-	68.715.427.000
BHU	-	44.823.473.000	115.000.000	44.938.473.000
BPKeu (Belanja Pegawai)	65.901.318.000	-	-	65.901.318.000
<b>Kedepatian 1 (D1)</b>	-	<b>7.869.092.000</b>	-	<b>7.869.092.000</b>
D1.1	-	3.170.255.000	-	3.170.255.000
D1.2	-	2.100.812.000	-	2.100.812.000
D1.3	-	2.598.025.000	-	2.598.025.000
<b>Kedepatian 2 (D2)</b>	-	<b>11.394.378.000</b>	-	<b>11.394.378.000</b>
D2.1	-	1.963.356.000	-	1.963.356.000
D2.2	-	7.521.299.000	-	7.521.299.000
D2.3	-	1.909.723.000	-	1.909.723.000
<b>Kedepatian 3 (D3)</b>	-	<b>7.247.289.000</b>	-	<b>7.247.289.000</b>
D3.1	-	3.539.260.000	-	3.539.260.000
D3.3	-	3.708.029.000	-	3.708.029.000
<b>Kedepatian 4 (D4)</b>	-	<b>6.918.050.000</b>	<b>71.500.000</b>	<b>6.989.550.000</b>
D4.1	-	1.944.566.000	-	1.944.566.000
D4.2	-	2.989.263.000	71.500.000	3.060.763.000
D4.3	-	1.984.221.000	-	1.984.221.000
<b>INSPEKTORAT</b>	-	<b>927.860.000</b>	-	<b>927.860.000</b>
<b>PUSLAT</b>	-	<b>3.295.782.000</b>	<b>473.000.000</b>	<b>3.768.782.000</b>

Unit Organisasi	51 Belanja Pegawai (Rp)	52 Belanja Barang (Rp)	53 Belanja Modal (Rp)	TOTAL PAGU (Rp)
<b>PUSDATIN</b>	-	<b>7.742.163.000</b>	<b>1.376.785.000</b>	<b>9.118.948.000</b>
<b>TOTAL</b>	<b>65.901.318.000</b>	<b>98.714.391.000</b>	<b>2.096.285.000</b>	<b>166.711.994.000</b>

## B. Efisiensi Anggaran

Pada Tahun 2025, terdapat kebijakan nasional yang tertuang pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Inpres Nomor 1 Tahun 2025) yang mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk melakukan Identifikasi Rencana Efisiensi Belanja Sesuai Besaran yang ditetapkan Menteri Keuangan. Lebih lanjut, efisiensi anggaran LKPP didasarkan pada:

- 1) Surat Menteri Keuangan Nomor Nomor S-37/MK.02/2025 tanggal 24 Januari 2025 Perihal Efisiensi Belanja Kementerian/ Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 2) Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Maret 2025 Perihal Tindak Lanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
- 3) Penyampaian Rincian Nilai Efisiensi Anggaran Melalui *One on One Meeting* bersama DJA dan DJPB.

Berdasarkan dinamika tersebut, anggaran efisiensi LKPP adalah sebesar Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP sebesar Rp166,71 M dengan rincian sebagai berikut:

Program	Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.413.061.000	8.856.040.000
106.01.WA Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.164.983.000	108.277.920.000
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.944.000</b>	<b>49.578.044.000</b> (29,75%)	<b>117.133.960.000</b> (70,25%)

Namun demikian mengingat sampai dengan saat ini masih belum terdapat kebijakan terkait dengan pengembalian atas pagu anggaran yang diefisiensikan, maka penyampaian pelaporan kinerja dan anggaran pada bulan Juni 2025 masih menggunakan pagu awal sebesar Rp166.711.944.

## C. Anggaran Pasca Efisiensi

### 1. Penyesuaian Anggaran Pasca Efisiensi

Pada bulan Februari 2025, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional) Tahun 2025-2029. Dalam Lampiran III Perpres 12 Tahun 2025, LKPP mengampu pencapaian 2 (dua) Indikator Kegiatan Prioritas yaitu KP 07.08.02 Nilai Kinerja Pengadaan dan KP 07.08.02 Tingkat Penerapan Tata Kelola Pengadaan. Pada Tahun 2025 terdapat 13 (tiga belas) Rincian Output Prioritas Nasional (RO PN) untuk mendukung pencapaian Indikator Kegiatan Prioritas tersebut.

Adanya kebijakan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD TA 2025, terdapat potensi dampak efisiensi anggaran terhadap pencapaian RO PN. Sebagai upaya pemenuhan kebutuhan anggaran RO PN untuk ketercapaian output baik secara kualitas maupun kuantitas, LKPP telah mengirimkan Surat Permohonan Relaksasi Efisiensi Anggaran Untuk Pencapaian Target Rincian Output Prioritas Nasional RPJMN 2025-2029 melalui surat nomor 6162/KA/03/2025 tanggal 18 Maret 2025, dimana LKPP mengajukan permohonan relaksasi atas blokir efisiensi anggaran RO PN yaitu sebesar Rp7,866,139,000,-

Selanjutnya, di samping mengusulkan relaksasi blokir atas seluruh anggaran PN di atas, LKPP juga mempertimbangkan anggaran efektif pasca efisiensi, dimana terdapat 4 (empat) RO PN yang saat ini tidak tersedia anggarannya (pagu efektif Rp0,-). Hal ini berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas pencapaian RO PN dan bahkan tidak dapat tercapai pada 4 RO PN tersebut. Adapun 4 (empat) RO PN tersebut adalah sebagai berikut:

- a. 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan,
- b. 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/berkelanjutan,
- c. 6319.UBB.121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2,
- d. 6323.QDG.111 - Penyedia UMK yang *Onboarding* dalam Sistem Pengadaan Digital.

Berdasarkan pertimbangan di atas dan dalam rangka mengupayakan pencapaian target output RO PN, dilakukan penyesuaian anggaran melalui tukar *tagging* blokir efisiensi dalam rangka memenuhi kebutuhan anggaran untuk ketercapaian *output* minimal (baik secara kuantitas dan kualitas) untuk 4 RO PN yang saat ini anggaran efektifnya Rp0,- (nol) sehingga terdapat perubahan pagu dengan rincian sebagai berikut:

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
1	6323.QDG.111 Penyedia UMK yang <i>On Boarding</i> dalam Sistem Pengadaan Digital	Rp440.000.000	Rp387.008.000	Rp52.992.000

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
2	6319.UBB.121 Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	Rp1.200.000.000	Rp1.132.845.000	Rp67.155.000
3	6319.PAH.131 Rancangan Peraturan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/ Berkelanjutan	Rp140.639.000	Rp116.889.000	Rp23.750.000
4	6319.PDA.131 Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	Rp337.237.000	Rp327.017.000	Rp10.220.000
5	6319.PEC.131 Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/ organisasi internasional /lembaga internasional	Rp668.974.000	Rp491.869.000	Rp177.105.000
6	6319.QDB.131 K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	Rp366.449.000	Rp354.124.000	Rp12.325.000
7	6323.QDC.131 Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	Rp364.869.000	Rp264.638.000	Rp100.231.000
8	6323.QDG.131 Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	Rp719.857.000	Rp545.361.000	Rp174.496.000
9	6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	Rp2.754.381.000	Rp2.518.398.000	Rp235.983.000
10	6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ	Rp554.817.000	Rp416.605.000	Rp138.212.000

No	RO Prioritas Nasional	Pagu Semula (Rp)	Pagu Blokir (Rp)	Pagu Efektif (Rp)
11	6321.SCF.511 Peserta pelatihan anti korupsi PBJ	Rp450.000.000	Rp321.312.000	Rp128.688.000
12	6322.UAI.431 K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	Rp269.782.000	Rp247.560.000	Rp22.222.000
13	6320.UAB.231 Sistem Pasar <i>Digital</i> Pengadaan Terintegrasi	Rp1.000.000.000	Rp586.291.000	Rp413.709.000
<b>TOTAL</b>		<b>Rp9.267.005.000</b>	<b>Rp7.709.917.000</b>	<b>Rp1.557.088.000</b>

Melalui surat Sekretaris Utama LKPP Nomor 6714/SES/03/2025 tanggal 26 Maret 2025 perihal Usulan Revisi Anggaran, dilakukan penyesuaian anggaran sehingga komposisi efisiensi menjadi sebagai berikut:

Program	Efisiensi Awal (Rp)	Efisiensi Penyesuaian (Rp)	Perubahan (Rp)
106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	28.413.061.000	28.256.839.000	(156.222.000)
106.01.WA Program Dukungan Manajemen	21.164.983.000	21.321.205.000	156.222.000
<b>TOTAL</b>	<b>49.578.044.000</b>	<b>49.578.044.000</b>	<b>0</b>

Adapun postur anggaran LKPP setelah penyesuaian efisiensi tersebut adalah sebagai berikut:

Program	Pagu Awal (Rp)	Efisiensi (Rp)	Pagu Tersedia (Rp)
106.01.CJ Program Pengadaan Barang/Jasa Nasional	37.269.091.000	28.256.839.000	9.012.252.000
106.01.WA Program Dukungan Manajemen	129.442.903.000	21.321.205.000	108.121.698.000
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.944.000</b>	<b>49.578.044.000</b> (29,75%)	<b>117.133.960.000</b> (70,25%)

## 2. Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Pasca Efisiensi

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-75/MK.02/2025 tanggal 13 Februari 2025 perihal Tindaklanjut Efisiensi Belanja Kementerian/Lembaga dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 yang menetapkan LKPP secara keseluruhan mendapatkan efisiensi belanja sebesar Rp45.578.044.000,-, Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Nota Dinas Nomor 5975/KPA/03/2025 tanggal 14 Maret 2025 Perihal Pemanfaatan Anggaran Konsolidasi Selama Masa Efisiensi.

Melalui nota dinas tersebut, disampaikan beberapa hal terkait pemanfaatan anggaran efektif pasca efisiensi yang dipusatkan/dikonsolidasikan di lingkup Unit Organisasi di bawah Sekretariat Utama. Anggaran yang dikonsolidasikan bersifat bersama dan dapat digunakan oleh Seluruh Unit Organisasi di LKPP dengan syarat memperoleh **persetujuan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)** dengan memperhatikan **prinsip efisiensi serta Prioritas Nasional**. Pemanfaatan anggaran tersebut dengan mempedomani ketentuan sebagai berikut:

No	Jenis Belanja	Ketentuan
1	Perjalanan Dinas	<p>Prioritas: Program Prioritas Nasional, kegiatan dihadiri oleh Kepala LKPP dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi madya yang melibatkan pihak luar</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Staf pendukung: memperhatikan prinsip efisiensi anggaran.</li><li>- Usulan wajib disertai KAK, rincian anggaran, dan formulir persetujuan KPA.</li><li>- Jika dibiayai anggaran pihak luar: mengikuti ketentuan biaya dan daftar peserta dari pihak tersebut.</li></ul>
2	Paket Meeting Dalam Kota	<ul style="list-style-type: none"><li>- Prioritas: Sama dengan perjalanan dinas.</li><li>- Peserta: Hanya yang terlibat langsung dalam kegiatan.</li><li>- Usulan wajib dengan KAK, rincian anggaran, dan formulir persetujuan KPA.</li></ul>
3	Jasa Lainnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Unit Organisasi tidak melakukan penambahan personil baru.</li><li>- Unit Organisasi mengusulkan penambahan personil Jasa Lainnya dikarenakan berakhirnya masa kontrak/pengunduran diri dihimbau tidak melakukan penggantian atas personil tersebut, kecuali ada kebutuhan mendesak dan mendapatkan persetujuan KPA.</li><li>- Perubahan kontrak yang menambah anggaran wajib pertimbangkan ketersediaan anggaran dan persetujuan KPA</li></ul>
4	Belanja Bahan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jamuan rapat hanya untuk kegiatan prioritas nasional dan dihadiri Kepala LKPP dan/atau Pejabat setingkat Pimpinan Tinggi Madya yang melibatkan pihak luar.</li><li>- Usulan harus disertai jumlah peserta dan persetujuan KPA.</li><li>- Didorong <i>paperless</i> guna mendukung efisiensi belanja ATK.</li></ul>

No	Jenis Belanja	Ketentuan
5	Belanja Jasa Profesi	- Usulan disertai KAK, rincian anggaran, harus mendapatkan persetujuan KPA dan mempertimbangkan ketersediaan anggaran masing-masing unit.
6	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	Usulan pembelian disertai perencanaan kebutuhan serta disetujui oleh KPA

#### D. Penyerapan Anggaran

Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan 30 Juni 2025 penyerapan anggaran LKPP adalah sebesar Rp56.564.597.231,- atau sebesar 33.93%. Adapun rincian penyerapan anggaran LKPP per jenis belanja adalah sebagai berikut:

##### \* Penyerapan per Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	36.245.232.693	55%	29.656.085.307
52 Belanja Barang	98.714.391.000	20.254.290.788	20,52%	78.460.100.212
53 Belanja Modal	2.096.285.000	65.073.750	3,10%	2.031.211.250
<b>Total</b>	<b>166.711.994.000</b>	<b>56.564.597.231</b>	<b>33,93%</b>	<b>110.147.396.769</b>

##### \* Penyerapan per Unit Organisasi Eselon I dan Eselon II Mandiri

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
<b>D1</b>	7.869.092.000	678.395.348	8,62%	7.190.696.652
<b>D2</b>	11.394.378.000	2.183.793.366	19,17%	9.210.584.634
<b>D3</b>	7.247.289.000	875.271.542	12,08%	6.372.017.458
<b>D4</b>	6.989.550.000	281.966.621	4,03%	6.707.583.379
<b>INSPEKTORAT</b>	927.860.000	82.787.399	8,92%	845.072.601
<b>PUSDATIN</b>	9.118.948.000	1.405.529.027	15,41%	7.713.418.973
<b>PUSLAT</b>	3.768.782.000	325.492.367	8,64%	3.443.289.633
<b>SES</b>	53.494.777.000	14.486.128.868	27,08%	39.008.648.132
<b>SES (Gaji)</b>	65.901.318.000	36.245.232.693	55,00%	29.656.085.307
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.994.000</b>	<b>56.564.597.231</b>	<b>33,93%</b>	<b>110.147.396.769</b>

\* Penyerapan per Unit Organisasi Eselon II

Unit Organisasi	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
<b>BHOSDM</b>	5.742.195.000	539.919.946	9,40%	5.202.275.054
<b>BHU</b>	44.938.473.000	13.619.549.496	30,31%	31.318.923.504
<b>BPKeu</b>	2.814.109.000	326.659.426	11,61%	2.487.449.574
<b>BPKeu (Gaji)</b>	65.901.318.000	36.245.232.693	55,00%	29.656.085.307
<b>D1.1</b>	3.170.255.000	302.003.081	9,53%	2.868.251.919
<b>D1.2</b>	2.100.812.000	158.554.414	7,55%	1.942.257.586
<b>D1.3</b>	2.598.025.000	217.837.853	8,38%	2.380.187.147
<b>D2.1</b>	1.963.356.000	444.768.000	22,65%	1.518.588.000
<b>D2.2</b>	7.521.299.000	1.200.137.496	15,96%	6.321.161.504
<b>D2.3</b>	1.909.723.000	538.887.870	28,22%	1.370.835.130
<b>D3.1</b>	3.539.260.000	225.204.520	6,36%	3.314.055.480
<b>D3.3</b>	3.708.029.000	650.067.022	17,53%	3.057.961.978
<b>D4.1</b>	1.944.566.000	73.272.923	3,77%	1.871.293.077
<b>D4.2</b>	3.060.763.000	58.844.582	1,92%	3.001.918.418
<b>D4.3</b>	1.984.221.000	149.849.116	7,55%	1.834.371.884
<b>INSPEKTORAT</b>	927.860.000	82.787.399	8,92%	845.072.601
<b>PUSDATIN</b>	9.118.948.000	1.405.529.027	15,41%	7.713.418.973
<b>PUSLAT</b>	3.768.782.000	325.492.367	8,64%	3.443.289.633
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.994.000</b>	<b>56.564.597.231</b>	<b>33,93%</b>	<b>110.147.396.769</b>

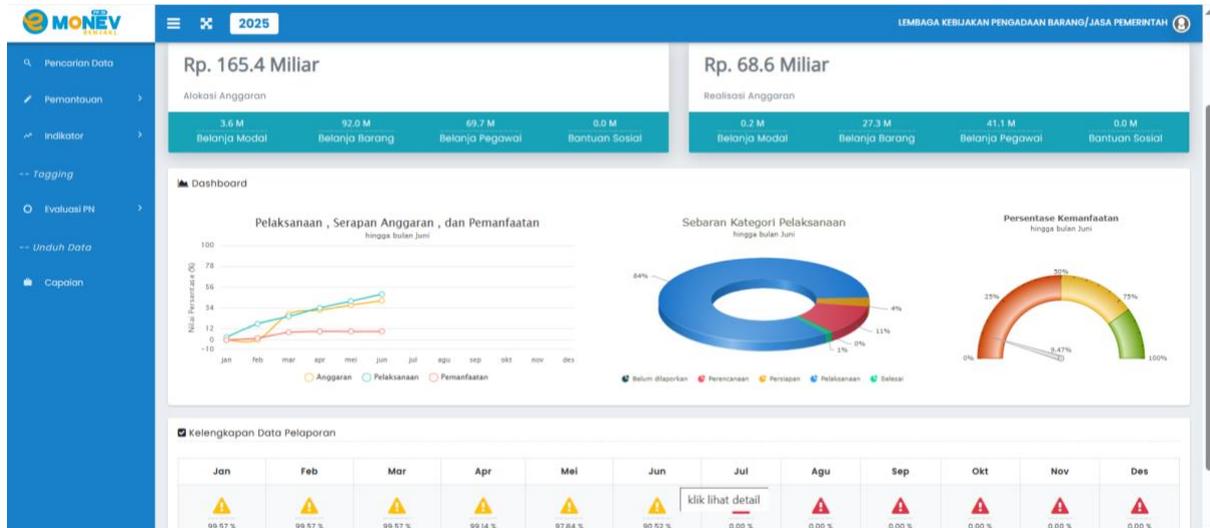
## 1.2 PELAPORAN EKSTERNAL

### A. Pelaporan Kinerja pada E-Monev BAPPENAS

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan bahwa seluruh Kementerian dan Lembaga perlu melaksanakan pemantauan. Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan melalui E-Monev Bappenas.

Pengumpulan data pada aplikasi ini adalah rutin setiap bulannya. Setiap K/L/PD diharapkan dapat melaporkan kinerjanya melalui e-monev Bappenas setiap bulan. Petunjuk pengisian e-monev Bappenas dapat dilihat melalui tautan [https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev\\_2021\\_v1\\_19032021.pdf](https://emonev.bappenas.go.id/fe/panduan/2021/Pedoman-eMonev_2021_v1_19032021.pdf).

LKPP telah melaporkan progres kinerja pada aplikasi e-monev Bappenas untuk periode kinerja Triwulan II (Januari s.d Juni 2025).



Gambar 1. Tampilan Aplikasi E-Monev Bappenas

## BAB II MONITORING DAN EVALUASI UNIT ORGANISASI

Pada pelaporan bulan Juni 2025, kinerja LKPP pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.

### 2.1 BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN (BPKEU)

#### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Biro Perencanaan dan Keuangan (BPKeu) memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01- Terpenuhinya kualitas penerapan akuntabilitas kinerja dan anggaran	Nilai kualitas perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja	Predikat: Sangat Baik	Predikat: Sangat Baik
		Indeks maturitas SPIP	Predikat: Level 3	Progres: 50%
		Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	Predikat: Baik	Progres: 50%
		Persentase kesalahan material dalam laporan keuangan yang ditoleransi pada pengelolaan keuangan	5 Persen	Progres: 50%

■ Target telah tercapai

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6599.EBA.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	Progres: 50%
2	6599.EBD.952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	6 Dokumen	Progres: 43%
3	6599.EBD.953	Layanan Pemantauan dan Evaluasi	4 Dokumen	Progres: 50,33%
4	6599.EBD.955	Layanan Manajemen Keuangan	17 Dokumen	Progres: 50%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Juni 2025 adalah 47%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Perencanaan dan Keuangan pada bulan Juni 2025 adalah 45,77%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Biro Perencanaan dan Keuangan adalah sebesar Rp68.715.427.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025, penyerapan per jenis belanja pada Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	36.245.232.693	55%	29.656.085.307
52 Belanja Barang	2.814.109.000	326.659.426	11.61%	2.487.449.574
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>68.715.427.000</b>	<b>36.571.892.119</b>	<b>53.22%</b>	<b>32.143.534.881</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BPKeu di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BPKeu sebesar Rp 1.176.325.000,- atau 41,80%.
2. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp3.067.000,-. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp54.800.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp51.733.000,- atau -94,40%.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat di berikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang

telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).

3. Guna tetap meningkatkan nilai IKPA di tingkat lembaga khususnya dalam penyerapan anggaran, BPKeu mengkoordinasikan seluruh unit organisasi agar terus memperhatikan delapan indikator IKPA, yaitu: Data Kontrak, Pengelolaan UP dan TUP, Dispensasi SPM, Penyerapan anggaran, Capaian Output, Penyelesaian Tagihan, Revisi Halaman 3 DIPA, Revisi DIPA.
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.2 BIRO HUKUM, ORGANISASI DAN SUMBER DAYA MANUSIA (BHOSDM)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia (BHOSDM) memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Meningkatnya capaian pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi	Indeks Kualitas Kebijakan	Predikat: Baik	Progres: 50%
		Indeks Reformasi Hukum	Predikat: Istimewa	Progres: 50%
		Skor komposit evaluasi kelembagaan	Skor: 77	Progres: 56.32 %
		Persentase tingkat penerapan sistem kerja untuk penyederhanaan birokrasi	100 Persen	Progres: 58.32%
		Persentase rekomendasi yang ditindaklanjuti atas pelaksanaan kegiatan RB LKPP	100 Persen	Progres: 51.77%
		Indeks sistem merit	Predikat: Baik	Progres: 30%

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6598.EBA.957	Layanan Hukum	1 Layanan	Progres: 50%
2	6598.EBA.960	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3 Layanan	Progres: 56.32%
3	6598.EBA.969	Layanan Bantuan Hukum	1 Layanan	Progres: 52.24%
4	6598.EBC.954	Layanan Manajemen SDM	3 Layanan	Progres: 56.10%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Juni 2025 adalah 53,67%.

#### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Hukum, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia pada bulan Juni 2025 adalah 54,94%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHOSDM adalah sebesar Rp5.742.195.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHOSDM sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	5.682.195.000	539.919.946	9.5%	5.142.275.054
53 Belanja Modal	60.000.000	-	0%	60.000.000
<b>Total</b>	<b>5.742.195.000</b>	<b>539.919.946</b>	<b>9.4%</b>	<b>5.202.275.054</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHOSDM di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp30.299.000,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp116.075.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar (-)Rp85.776.000 atau (-)73,90%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHOSDM sebesar Rp Rp4.494.841.000 atau 78,28%

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.3 BIRO HUBUNGAN MASYARAKAT DAN UMUM (BHU)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Biro Hubungan Masyarakat dan Umum (BHU) memiliki 7 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya pelayanan publik yang berkualitas	Indeks pelayanan publik	Predikat: Baik	Progres: 95%
		Indeks keterbukaan informasi publik	Predikat: Menuju Informatif	Progres: 0%
		Predikat Pelayanan Publik Berbasis HAM	Predikat: Tersedia	Progres: 0%
2.	02-Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas pelayanan umum internal	Hasil pengawasan kearsipan	Predikat: Memuaskan	Progres: 50%
		Indeks tata kelola pengadaan	Predikat: Sangat Baik	Progres: 50%
		Indeks pengelolaan aset	Indeks 3,35	Progres: 50%
		Indeks layanan penyelenggaraan ketatausahaan	Predikat: Baik	Progres: 50%
		Indeks layanan keprotokolan	Predikat: Baik	Progres: 40%
	Indeks Kepuasan Pegawai Atas Layanan Kerumahtanggaan	Predikat: Memuaskan	Progres: 50%	

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
1	6600.EBA.956	Layanan BMN	Layanan	1	Progres: 50%
2	6600.EBA.958	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi	Layanan	6	Progres: 44.32%
3	6600.EBA.959	Layanan Protokoler	Layanan	1	Progres: 36.76%
4	6600.EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	Progres: 50%

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi
5	6600.EBC.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	Progres: 60,97%
6	6600.EBD.974	Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Dokumen	1	Progres: 50%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Juni 2025 adalah 48,68%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada bulan Juni 2025 adalah 49,66%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran BHU adalah sebesar Rp 44.938.473.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada BHU sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	44.823.473.000	13.554.475.746	30.24%	31.268.997.254
53 Belanja Modal	115.000.000	65.073.750	56.59%	49.926.250
<b>Total</b>	<b>44.938.473.000</b>	<b>13.619.549.496</b>	<b>30.31%</b>	<b>31.318.923.504</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada BHU di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp2.491.224.343. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp3.304.629.040 sehingga memiliki deviasi sebesar (-)Rp813.404.697 atau (-)24,61%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada BHU sebesar Rp8.645.334.000 atau 19,24% dari pagu awal.
3. Pada RO - Layanan BMN, komponen 053-Penyusunan laporan BMN di Tahun 2025, tidak dilakukan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semester 2 TA 2024 (sesuai dengan surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor: S-135/KN/KN.2/2024 tanggal 30 Desember 2024). Sehingga dilakukan penyesuaian target realisasi menjadi 3 Laporan.

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Terkait penyesuaian terget pada komponen 053 – Penyusunan Laporan BMN, RO Layanan BMN agar dilakukan pengajuan usulan perubahan target melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk diproses lebih lanjut.
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.4 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN UMUM (D1.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) memiliki 2 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 4 indikator Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	03-Meningkatnya partisipasi dan kompetisi UMKK	[IKSK] 01-Jumlah penyedia UMKK yang on-boarding dalam sistem pengadaan digital	50 UMKK	Progres: 25.00%
2	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 01-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan umum	1 Rancangan Peraturan	Progres: 68.75%

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AAC.111	Rancangan Peraturan Pemerintah tentang peraturan turunan Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 RPP	-
2.	6319.AAH.111	Rancangan Peraturan terkait Pedoman di bidang Pengadaan Barang/Jasa Publik	1 Rancangan Peraturan	Progres: 95,00%
3.	6319.ABL.111	Rekomendasi Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2 Rekomendasi Kebijakan	Progres: 42.50%
4.	6323.QDG.111	Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital	50 UMKM	Progres: 25.00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) pada bulan Juni 2025 adalah 40,63%.

#### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum (D1.1) pada bulan Juni 2025 adalah 42,33%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.1 adalah sebesar Rp3.170.255.000,00. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.170.255.000	302.003.081	9.53%	2.868.251.919
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3.170.255.000</b>	<b>302.003.081</b>	<b>9.53%</b>	<b>2.868.251.919</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.1 di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D1.1 sebesar Rp 2.610.873.000 atau 82,36% dari pagu awal.
2. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6323.QDG.111 Penyedia UMK yang On-Boarding dalam Sistem Pengadaan Digital.
3. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp29.165.448. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp36.300.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp7.134.552 atau -19,65%.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.5 DIREKTORAT PENGEMBANGAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGADAAN KHUSUS (D1.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus memiliki 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 02-Jumlah rumusan kebijakan pengadaan khusus	2 Dokumen	Progres: 60.00%
2	02-Tercapainya desa yang memiliki maturitas pengadaan	[IKSK] 01-Jumlah Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	1 Desa	Progres: 50.00%
3	03-Terselenggaranya Pendampingan PBJ Khusus	[IKSK] 01-Persentase pemenuhan pendampingan PBJ khusus	100 Persen	55 Persen

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.AFA.124	Model Dokumen PBJ Khusus	2 NSPK	Progres: 60.00%
2	6319.BDB.123	Instansi/proyek yang mendapatkan pendampingan/diberikan pendapat dalam PBJ Khusus	5 Lembaga	2 Lembaga
3	6319.UBB.121	Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2	1 Desa	Progres: 50.00%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) pada bulan Juni 2025 adalah 55,00%.

#### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus (D1.2) pada bulan Juni 2025 adalah 48,33%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D1.2 adalah sebesar Rp2.100.812.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.100.812.000	158.554.414	7.55%	1.942.257.586
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.100.812.000</b>	<b>158.554.414</b>	<b>7.55%</b>	<b>1.942.257.586</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.2 di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D12 sebesar Rp1.714.457.000 atau 81,61% dari pagu awal.
2. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6319.UBB 121 - Desa yang Memiliki Nilai Maturitas Pengadaan Minimal Level 2.
3. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp20.323.241. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp45.895.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp25.571.759 atau -55,72%.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.6 DIREKTORAT PENGEMBANGAN IKLIM USAHA DAN KERJASAMA INTERNASIONAL (D1.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional memiliki 4 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1.	[SK2.4] Meningkatnya pemanfaatan produk berkelanjutan pada sistem pengadaan	[IKSK] 01-Persentase peningkatan rencana pengadaan berkelanjutan dalam SIRUP	9 Persen	Progres: 59.00%
2.	[SK2.2] Meningkatnya partisipasi dan kompetensi UMKK	[IKSK] 02-Jumlah Partisipasi UMKK yang terlibat dalam PBJ	824.863 UMKK	Progres: 40.00%
3.	[SK4.1] Tersedianya kebijakan pengadaan barang/jasa	[IKSK] 03-Jumlah rumusan kebijakan terkait pengadaan berkelanjutan	1 Dokumen	Progres: 66.00%
		[IKSK] 04-Jumlah rekomendasi kebijakan pengadaan barang/jasa dalam kerja sama internasional	1 Rekomendasi	Progres: 54.00%

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6319.PDA.131	Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah	2 Produk	Progres: 59.00%
2	6319.QDB.131	K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan	2 Lembaga	Progres: 59.00%
3	6319.PAH.131	Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan	1 Rancangan Peraturan	Progres: 66.00%
4	6319.PEC.131	Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional	2 Kegiatan	Progres: 47.00%
5	6323.QDG.131	Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ	500 UMKM	128 UMKM

No	MAK	Rincian Ouput	Target 2025	Realisasi/ Progres
6	6323.QDC.131	Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional	200 Orang	127 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional (D1.3) pada bulan Juni 2025 adalah 55,17%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Iklim Usaha Dan Kerjasama Internasional (D1.3) pada bulan Juni 2025 adalah 59,50%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu D1.3 adalah sebesar Rp2.598.025.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D1.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.598.025.000	217.837.853	8.38%	2.380.187.147
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.598.025.000</b>	<b>217.837.853</b>	<b>8.38%</b>	<b>2.380.187.147</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D1.3 di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

- Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D1.3 sebesar Rp 2.099.898.000 atau 80,83% dari pagu awal.
- Terdapat 6 (enam) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu:
  - 6319.PDA.131 - Produk ramah lingkungan/berkelanjutan yang masuk dalam sistem pengadaan pemerintah
  - 6319.QDB.131 - K/L/Pemda yang menerapkan pengadaan barang dan jasa pemerintah untuk produk ramah lingkungan/ berkelanjutan
  - 6319.PAH.131 - Rancangan Peraturan terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Produk Ramah Lingkungan/Berkelanjutan
  - 6319.PEC.131 - Kerjasama di bidang PBJP dengan negara mitra/organisasi internasional/lembaga internasional

- e. 6323.QDG.131 - Pelaku Usaha UMK yang Mengikuti Kegiatan Peningkatan Kapasitas Usaha dalam PBJ
  - f. 6323.QDC.131 - Pemangku kepentingan yang mendapatkan akses informasi mengenai PBJP dalam kerangka kerjasama internasional.
3. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp29.219.000. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp43.722.600 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp14.503.600 atau -33,17%.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.7 DIREKTORAT PERENCANAAN TRANSFORMASI, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENGADAAN (D2.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan memiliki 2 Sasaran Kegiatan dengan 7 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01- Terselenggaranya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	01-Jumlah laporan evaluasi pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	2	Progres: 48%
		02-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ Nasional	Laporan	52	29
		03-Jumlah laporan monitoring mingguan pelaksanaan PBJ pada K/L dan Pemda	Laporan	52	29
		04-Jumlah buku profil pengadaan barang/jasa pemerintah	Buku	1	Progres: 50%
		05-Jumlah kajian pengembangan platform pengadaan nasional	Kajian	2	Progres: 40%
2	04-Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda	01-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan bimbingan teknis perencanaan pengadaan berbasis data pengadaan	K/L/Pemda	124	50
		02-Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan pendampingan berbasis kajian evaluasi pelaksanaan PBJ	K/L/Pemda	50	Progres: 5%

## 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6320.BAH.211	Layanan Sistem Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi PBJP	Layanan	2	Progres 50%
2	6320.FAE.211	Rekomendasi Hasil Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Kinerja PBJP	Laporan	3	Progres 49%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada bulan Juni 2025 adalah 49,5%.

## 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan, dan Evaluasi Pengadaan pada bulan Juni 2025 adalah 49,5%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan Kepka LKPP Nomor 79 Tahun 2025, pagu anggaran D2.1 adalah sebesar Rp1.963.356.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.963.356.000	444.768.000	22.65%	1.518.588.000
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.963.356.000</b>	<b>444.768.000</b>	<b>22.65%</b>	<b>1.518.588.000</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.1 di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.1 sebesar Rp1,014,103,000 atau sebesar 51.65% dari pagu awal.
2. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp45.405.000,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp80,781,000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp35.376.000,- atau -43,79%.
3. Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya kualitas perencanaan pengadaan pada K/L/Pemda, persentase progres indikator Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan

pendampingan berbasis kajian evaluasi pelaksanaan PBJ pada bulan Juni 2025 masih sebesar 5% atau dalam tahap perencanaan, berdasarkan hasil konfirmasi dan validasi hal tersebut dikarenakan merupakan kinerja yang baru diusulkan dan ditetapkan pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja LKPP tahun 2025 dan baru akan dilakukan penyusunan rencana kegiatan pada bulan Juli (Triwulan III) tahun 2025.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Perencanaan Transformasi, Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Terhadap IKSK Jumlah K/L/Pemda yang mendapatkan pendampingan berbasis kajian evaluasi pelaksanaan PBJ diharapkan dapat dilakukan akselerasi perencanaan dan pelaksanaan, untuk dapat memastikan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai.

## 2.8 DIREKTORAT SISTEM PENGADAAN DIGITAL (D2.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Sistem Pengadaan Digital (D2.2) mengampu 1 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 1 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	01-Jumlah layanan pengembangan platform pengadaan nasional	Layanan	1	Progres 50%
		02-Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung	Layanan	1	Progres 50%

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6320.FAB.221	Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital	Layanan	1	Progres 50%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Sistem Pengadaan Digital pada bulan Juni 2025 adalah 50%.

#### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Sistem Pengadaan Digital pada bulan Juni 2025 adalah 50%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.2 adalah sebesar Rp7.521.299.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D2.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.521.299.000	1.200.137.496	15.96%	6.321.161.504
53 Belanja Modal	-	-	-	-

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
Total	7.521.299.000	1.200.137.496	15.71%	6.321.161.504

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Catatan pada kinerja D2.2 di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.2 sebesar Rp5,188,431,000 atau sebesar 68.98% dari pagu awal.
2. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp18,900,000,-. Realisasi ini jauh lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp177,600,000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp158,700,000,- atau -89.36%.
3. Terhadap Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung dan Rincian Output Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital terdapat hal perlu diperhatikan mengingat adanya kebijakan efisiensi belanja, dimana hal tersebut berpengaruh terhadap peminatan pemenuhan 17 standar pada LPSE. Dimana dalam rangka pencapaian target kinerja semula direncanakan kegiatan bimbingan teknis LPSE sebanyak 24 *batch*, menjadi 18 *batch* bimbingan teknis LPSE dalam rangka menindaklanjuti kebijakan efisiensi Presiden.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Sistem Pengadaan Digital adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Terhadap kendala pada Indikator Sasaran Kegiatan Jumlah layanan penyelenggaraan SPSE dan sistem pendukung dan Rincian Output Layanan Penyelenggaraan Sistem Pengadaan Digital yang diakibatkan pemblokiran anggaran atas dukungan kebijakan efisiensi Presiden, diharapkan untuk dapat melakukan penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan dengan memanfaatkan anggaran efektif demi menjaga ketercapaian kinerja unit organisasi dan lembaga.
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.9 DIREKTORAT PASAR DIGITAL PENGADAAN (D2.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Pasar Digital Pengadaan mengampu 2 Sasaran Kegiatan dengan 2 Indikator Sasaran Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya platform pengadaan nasional dan pengembangan platform pengadaan nasional	03-Jumlah modul aplikasi integrasi pasar digital pengadaan	Modul	1	Progres 50%
2	03-Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	01-Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan	Produk	200.000	357.187

Target telah tercapai

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6320.FAB.231	Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi	Modul Aplikasi	1	Progres 50%
2	6323.BIA.231	Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan	Produk	200.000	357.187

Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada bulan Juni 2025 adalah 45%.

#### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pasar Digital Pengadaan pada bulan Juni 2025 adalah 50%.

## B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D2.3 adalah sebesar Rp1,909,723,000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada D2.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.909.723.000	538.887.870	28.22%	1.370.835.130
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.909.723.000</b>	<b>538.887.870</b>	<b>28.22%</b>	<b>1.370.835.130</b>

## C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D2.3 di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir yang diakibatkan oleh kebijakan efisiensi anggaran belanja pada D2.3 sebesar Rp775,388,000 atau sebesar 40.60% dari pagu awal.
2. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp66,670,000,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp79,215,000,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp12,545,000,- atau -15.84%.
3. Pada Sasaran Kegiatan Meningkatnya produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan dengan indikator Jumlah produk hasil kurasi pada pasar digital pengadaan dan Rincian Output Produk Hasil Kurasi pada Pasar Digital Pengadaan, sampai dengan periode monitoring bulan Juni 2025 realisasi yang telah tercapai telah mencapai target pada tahun 2025 yaitu 357.187 produk dari target sebanyak 200.000 produk.
4. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu 6320.FAB.231 - Sistem Pasar Digital Pengadaan Terintegrasi.

## D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan kepada Direktorat Pasar Digital Pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).

3. Terkait dengan Sasaran Kegiatan dan Rincian Output yang realisasinya telah mencapai target, agar berkoordinasi secara resmi melalui nota dinas kepada Biro Perencanaan dan Keuangan untuk melakukan pembahasan lebih lanjut atas target yang sampai dengan bulan Juni 2025 telah tercapai. Mengingat bahwa capaian ini akan menjadi catatan oleh BAPPENAS pada saat rapat monitoring dan evaluasi di tingkat Kementerian/Lembaga.
4. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.10 DIREKTORAT PENGEMBANGAN PROFESI DAN KELEMBAGAAN (D3.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan (D3.1) memiliki 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan, 3 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	[IKSK] 01-Jumlah SDM JF PPBJ di K/L/Pemda	10.570 Orang	10.390 Orang
		[IKSK] 02-Jumlah SDM PBJ yang memiliki kompetensi okupasi	1.675 Orang	16.682 Orang
		[IKSK] 03-Jumlah SDM PBJ Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ yang Kompeten	10 orang	107 Orang
2	02-Meningkatnya kapabilitas UKPBJ	[IKSK] 01-Jumlah K/L/Pemda yang memiliki UKPBJ yang mencapai maturitas minimal level 3	467 UKPBJ	458 UKPBJ
		[IKSK] 02-Jumlah UKPBJ yang telah siap menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan-Proaktif	1 UKPBJ	Progres: 35%



Target telah tercapai

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.ABQ.311	Rekomendasi Kebijakan Pembinaan SDM dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Rekomendasi Kebijakan	1	Progres : 68%
2.	6321.PDE.311	UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3	Lembaga	28	19 Lembaga
3.	6321.PDH.311	SDM PBJ dan Non-JF PBJ	Orang	550	370 Orang

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada bulan Juni 2025 adalah 54,33%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Pengembangan Profesi dan Kelembagaan pada bulan Juni 2025 adalah 35%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D3.1 adalah sebesar Rp3.539.260.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	Rp3.539.260.000	Rp225.204.520	6.36%	Rp 3.314.055.480
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>Rp3.539.260.000</b>	<b>Rp 225.204.520</b>	<b>6.36%</b>	<b>Rp3.314.055.480</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.1 di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp13.841.585. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp34.378.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp20.536.415 atau -59,74%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.1 sebesar Rp3.063.811.000 atau 86,57%.
3. Terdapat 2 (dua) Rincian Output yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6321.PDE.311 UKPBJ yang Mencapai Kematangan Minimal Level 3 dan RO 6321.PDH.311 SDM PBJ dan Non-JF PBJ.

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran

yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).

3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.11 DIREKTORAT SERTIFIKASI PROFESI (D3.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Sertifikasi Profesi (D3.3) memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 6 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2024	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	Jumlah Peserta yang mengikuti Sertifikasi Kompetensi Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	4860 Orang	4400 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi Okupasi	600 orang	405 Orang
		Jumlah Peserta yang Mengikuti Sertifikasi Kompetensi SDM Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ dan Kepala UKPBJ	0 Orang	-
		Indeks Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi PBJ	70 Indeks	Progres : 50 %

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi /Progres
1	6321.ADD.331	Lembaga Pelaksana Uji Kompetensi PBJ yang Terstandar	Lembaga	5	3
2	6321.ADG.331	Asesor yang Mendapatkan Pembinaan	Orang	75	Progres: 45%
3	6321.ADI.331	Peserta Sertifikasi SDM PBJ	Orang	5.480	4.805
4	6321.AFA.331	Pedoman Sertifikasi PBJP	Pedoman	1	Progres : 70%
5	6321.AFA.332	Materi Uji Sertifikasi PBJP	NSPK	10	7
6	6321.CCL.331	Sarana Sertifikasi PBJP	Unit	10	5

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Sertifikasi Profesi pada bulan Juni 2025 adalah 61.25%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Sertifikasi Profesi pada bulan Juni 2025 adalah 59.33%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D3.3 adalah sebesar Rp3.708.029.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D3.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.708.029.000	650.067.022	17.53%	3.057.961.978
53 Belanja Modal	-	-	-	-
Total	3.708.029.000	650.067.022	17.53%	3.057.961.978

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D3.3 di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D3.3 sebesar Rp2.321.421.000 atau 62,61%.
2. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp144.471.902,-. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp99.691.781,- sehingga memiliki deviasi sebesar Rp44.780.121,- atau 44.92%

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran

yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).

3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.12 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH PUSAT (D4.1)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Pada Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat (D4.1) memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Kegiatan dan 3 (tiga) Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probitly Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	01-Jumlah kegiatan konsolidasi pengadaan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga	1 Kegiatan	Progres: 41,67%
		02-Jumlah kegiatan probitly advice dan/atau advokasi yang dilakukan kepada Kementerian/Lembaga	2 Kegiatan	2 Kegiatan
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/menyelenggarakan <i>clearing house</i> pengadaan	52 K/L	51 K/L
3	2.1-Meningkatnya penggunaan PDN dan pemberdayaan UMKK	01-Jumlah Kementerian/Lembaga yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam proses PBJ	6 K/L	4 K/L
		02-Jumlah Kementerian/Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam Rangka Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ	6 K/L	4 K/L

Keterangan:

 Target telah tercapai

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	6323.FAI.411	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	K/L	6	4
2	6322.FAI.412	Kementerian/ Lembaga yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	K/L	2	1

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
3	6322.FAI.413	Kementerian/ Lembaga yang Mendapatkan <i>Probity Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	3	2

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat pada bulan Juni 2025 adalah 50%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat pada bulan Juni 2025 adalah 50%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.1 adalah sebesar Rp 1.944.566.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.1 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.944.566.000	73.272.923	3,77%	1.871.293.077
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.944.566.000</b>	<b>73.272.923</b>	<b>3,77%</b>	<b>1.871.293.077</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.1 di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial) sebesar Rp 0,-. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp5.775.495,- sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp5.775.495 atau -100%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.1 sebesar Rp1.799.078.000 atau sebesar 92,52% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu 01-Jumlah K/L yang mengimplementasikan/ menyelenggarakan *clearing house* pengadaan dengan capaian 50 K/L pada tahun 2024.

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.13 DIREKTORAT ADVOKASI PEMERINTAH DAERAH (D4.2)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Pada Tahun 2025, Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah (D4.2) memiliki 6 (enam) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 3 (tiga) Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	02-Terselenggaranya Konsolidasi, Probitly Advice, dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	03-Jumlah kegiatan konsolidasi yang dilaksanakan oleh Pemda	20 Kegiatan	8 Kegiatan
		04-Jumlah kegiatan <i>probitly advice</i> yang dilakukan di Pemda	4 Kegiatan	Progres: 0%
		05-Jumlah Kegiatan Advokasi yang dilakukan di Pemda	75 Kegiatan	31 Kegiatan
2	03-Terselenggaranya <i>clearing house</i> pengadaan yang efektif	02-Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan <i>clearing house</i>	110 Pemda	107 Pemda
3	02-Meningkatnya penggunaan produk dalam negeri (PDN) dan pemberdayaan UMKK	03-Jumlah pemerintah daerah yang mendapatkan advokasi dalam rangka peningkatan penggunaan PDN dalam proses PBJ	48 Pemda	23 Pemda
		04-Jumlah Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam Rangka Pemberdayaan UMKK dalam Proses PBJ	48 Pemda	23 Pemda

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6323.FAI.421	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan Advokasi dalam rangka Peningkatan Penggunaan PDN dan Pemberdayaan UMK dalam Proses PBJ	Pemda	48	23
2	6322.FAI.422	Pemda yang Terbangun Kapabilitas untuk Melaksanakan <i>Clearing House</i>	Pemda	10	7
3	6322.FAI.423	Pemerintah Daerah yang Mendapatkan <i>Probitly Advice</i> , Konsolidasi dan/atau Advokasi	K/L	75	30

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah pada bulan Juni 2025 adalah 51,46%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Advokasi Pemerintah Daerah pada bulan Juni 2025 adalah 43,89%.

#### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.2 adalah sebesar Rp 3.060.763.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada D4.2 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	2.989.263.000	58.844.582	1,97%	2.930.418.418
53 Belanja Modal	71.500.000	-	-	71.500.000
<b>Total</b>	<b>3.060.763.000</b>	<b>58.844.582</b>	<b>1,92%</b>	<b>3.001.918.418</b>

#### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.2 di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp 0,-. Realisasi ini lebih kecil dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp6.225.500,- sehingga memiliki deviasi sebesar - Rp6.225.500 atau- 100%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.2 sebesar Rp2.914.139.000 atau sebesar 95,21% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja sasaran kegiatan yang merupakan indikator dengan capaian berlanjut dari tahun 2024 yaitu “Jumlah Pemda yang mengimplementasikan/menyelenggarakan *clearing house*” dan dengan capaian 100 Pemda pada tahun 2024.

#### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang

telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).

3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.14 DIREKTORAT PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM (D4.3)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum (D4.3) memiliki 5 (lima) Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan 5 (lima) Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Meningkatnya Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	01-Jumlah K/L/Pemda yang Terbangun Kapabilitas Pencegahan Korupsi Pengadaan	2 K/L/Pemda	4 K/L/Pemda
2	04-Meningkatnya dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	01-Persentase layanan PKA yang Optimal*	30 Persen	42 Persen
		02-Persentase layanan LPS yang Optimal*	30 Persen	66,96 Persen
		03-Persentase layanan penanganan pengaduan yang optimal*	30 Persen	47 Persen
		04-Jumlah instansi/ <i>stakeholder</i> yang mendapatkan pembinaan dalam dukungan penegakan hukum dan penyelesaian permasalahan PBJ	4 Lembaga	3 Lembaga

Keterangan:

\*) Realisasi indikator akan terus berubah setiap bulannya dengan nilai final pada bulan Desember 2025



Target telah tercapai

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6322.FAI.431	Instansi/Stakeholder yang Mendapatkan Pembinaan dalam Dukungan Penegakan Hukum dan Penyelesaian Permasalahan Kontrak	Lembaga	4	3
2	6322.BCE.431	Perkara/Permasalahan Kontrak PBJ yang Terlayani	Perkara	250	167
3	6322.UAI.431	K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan	Lembaga	2	4
4	6322.BCE.432*	Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas	Perkara	10	7

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
5	6322.BCE.433*	Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal	Perkara	200	179

Keterangan:

\*) Saat ini masih dalam proses penyesuaian informasi kinerja

 Target telah tercapai

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum pada bulan Juni 2025 adalah 61,43%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum pada bulan Juni 2025 adalah 56,42%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran D4.3 adalah sebesar Rp 1.984.221.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif) penyerapan per jenis belanja pada D4.3 sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	1.984.221.000	149.849.116	7,55%	1.834.371.884
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1.984.221.000</b>	<b>149.849.116</b>	<b>7,55%</b>	<b>1.834.371.884</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada D4.3 di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp 0,-. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan dengan Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp31.238.000 sehingga memiliki deviasi sebesar -Rp31.238.000,- atau -100%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada D4.3 sebesar Rp Rp1.667.207.000 atau 84,02% dari pagu awal.
3. Terdapat 1 (satu) Rincian Output (RO) yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6322.UAI.431 K/L/Pemda Yang Terbangun Kapabilitas Untuk Pencegahan Korupsi Pengadaan.
4. Terdapat 2 (dua) RO yang merupakan RO yang masih dalam penyesuaian dokumen anggaran yaitu:

- a. 6322.BCE.433 - Layanan Pemberian Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang optimal; dan
- b. 6322.BCE.432 - Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Kontrak PBJ yang berkualitas.

---

#### **D. Rekomendasi**

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2. 15 INSPEKTORAT

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Inspektorat memiliki 4 Indikator Kinerja Kegiatan dan 2 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1.	01-Terwujudnya kualitas tata kelola pengawasan intern organisasi	Persentase Pemenuhan Kapabilitas APIP pada Level 4	33.33 persen	Progres: 48%
		Indeks Pengelolaan Integritas	Predikat: Cukup	Progres: 52.38%
		Persentase Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	72 Persen	Progres: 50%
		Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan dan Pengawasan	80 Persen	Progres: 52.80%

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	5664.EBA.962	Layanan Umum	Dokumen	9	Progres: 45%
2	5664.EBA.965	Layanan Audit Internal	Dokumen	12	Progres: 45%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Inspektorat pada bulan Juni 2025 adalah 45%.

#### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Inspektorat pada bulan Juni 2025 adalah 34.34%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Inspektorat adalah sebesar Rp927.860.000. Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Inspektorat sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	927.860.000	82.787.399	8.92%	845.072.601
53 Belanja Modal	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>927.860.000</b>	<b>82.787.399</b>	<b>8.92%</b>	<b>845.072.601</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Terdapat beberapa catatan pada Inspektorat di bulan Juni 2025 sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Inspektorat sebesar Rp811.811.000 atau 87,49%.
2. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp0,-. Realisasi ini lebih rendah dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp11.212.000,- sehingga memiliki deviasi sebesar - Rp11.212.000,- atau -100%.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.15 PUSAT PELATIHAN SDM PENGADAAN BARANG/JASA

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa memiliki 6 Indikator Kinerja Kegiatan dan 7 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/Progres
1	01-Terwujudnya SDM PBJ yang kompeten	04- Jumlah Peserta Pelatihan Fungsional dan Teknis Fungsional PBJ	950 Orang	700 Orang
		05- Jumlah Peserta Pelatihan Okupasi PBJ	6.700 Orang	3.045 Orang
		03- Jumlah Peserta Pelatihan Perancang Kebijakan dan Sistem PBJ, Ekosistem PBJ, dan Kepala UKPBJ	1.110 Orang	694 Orang
		04- Jumlah Peserta Pelatihan Tematik PBJ	9.700 Orang	8.483 Orang
		08- Jumlah Peserta Pelatihan Anti Korupsi PBJ	200 Orang	214 Orang
		09- Jumlah Peserta Pelatihan Teknis, Manajerial, dan Sosiokultural SDM PBJ	400 Orang	138 Orang

#### 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Output	Satuan	Target 2025	Realisasi/Progres
1	6321.CAA.511	Media Pembelajaran Berbasis TIK	Paket	3	Progres: 42%
2	6321.DCF.511	Peserta Pelatihan PBJ	Orang	12.000	7.799 Orang
3	6321.DCF.512	SDM yang Mendapatkan Pelatihan Perancang Kebijakan PBJ	Orang	400	280 Orang
4	6321.FAE.511	Laporan Penjaminan Mutu Penyelenggaraan Pelatihan PBJ	Laporan	5	Progres: 55%
5	6321.SCF.511	Peserta Pelatihan Anti Korupsi	Orang	200	214 Orang
6	6321.AFA.511	Program dan Kurikulum Pelatihan PBJ	NSPK	3	Progres: 53%
7	6321.AFA.511	Pedoman Pelatihan PBJ	Pedoman	4	Progres: 60%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa pada bulan Juni 2025 adalah 57,14%.

### 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Pusat Pelatihan SDM Pengadaan Barang/Jasa pada bulan Juni 2025 adalah 47,71%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Puslat SDM PBJ adalah sebesar Rp3.768.782.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif), penyerapan per jenis belanja pada Puslat PBJ sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	3.295.782.000	325.492.367	9.88%	2.970.289.633
53 Belanja Modal	473.000.000	-	-	473.000.000
<b>Total</b>	<b>3.768.782.000</b>	<b>325.492.367</b>	<b>8.64%</b>	<b>3.443.289.633</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdiklat di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Puslat sebesar Rp3.088.033.000 atau 81,94%.
2. Terdapat 1 (satu) Rincian Output yang menjadi Prioritas Nasional yaitu RO 6321.SCF.511 Peserta Pelatihan Anti Korupsi.
3. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp78.133.670. Realisasi ini lebih besar dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp54.350.000 sehingga memiliki deviasi sebesar Rp23.783.670 atau 43,76%.

### D. Rekomendasi

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran yang

telah disesuaikan dengan kebijakan efisiensi agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).

3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## 2.16 PUSAT DATA DAN INFORMASI (PUSDATIN)

### A. Capaian Kinerja Fisik

Berdasarkan Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2025, Pusat Data Dan Informasi (PUSDATIN) memiliki 13 Indikator Kinerja Kegiatan dan 4 Rincian Output dengan rincian sebagai berikut:

#### 1. Sasaran Kegiatan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator	Target 2025	Realisasi/ Progres
1.	01-Terwujudnya Layanan Data yang Informatif	Nilai Indeks Pembangunan Statistik	Indeks 2,6	Progres: 50%
		Persentase Pemenuhan Data Prioritas	20 Persen	Progres: 50%
2.	02- Terselenggaranya Platform Manajemen Perkantoran Terintegrasi dan Sistem Pendukung PBJ	Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi manajemen perkantoran	3 Persen	Progres: 50%
		Persentase Pembangunan dan Pengintegrasian Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	0 Persen	Progres: 25%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi manajemen perkantoran	20 Persen	Progres: 50%
		Persentase Terpeliharanya Sistem Informasi Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	10 Persen	Progres: 50%
3.	03-Terwujudnya Layanan Pengelolaan Infrastruktur dan Keamanan Informasi TIK yang andal dan responsif	Persentase Ketersediaan Layanan Jaringan Perkantoran	70 Persen	Progres: 48.70%
		Persentase Ketersediaan Layanan Komputasi	70 Persen	Progres: 48.70%
		Predikat Cyber Security Maturity (CSM)	Indeks 3,7	Progres: 50%
		Persentase Insiden Keamanan Informasi yang ditangani	10 Persen	Progres: 50%
4.	04- Terwujudnya tata kelola Pusdatin dan SPBE yang akuntabel	Nilai SAKIP Pusdatin	Nilai: 65	Progres: 50%
		Nilai Indeks SPBE	Nilai: 3,57	Progres: 50%
		Hasil Survei Kepuasan Layanan Pusdatin	Nilai: 2,5	Progres: 50%

## 2. Rincian Output

No	MAK	Rincian Ouput	Satuan	Target 2025	Realisasi/ Progres
1	7033.EBA.963	Layanan Data dan Informasi	Layanan	1	Progres: 50%
2	7033.BMA.963	Layanan Data Warehouse Walidata LKPP	Layanan	1	Progres: 50%
3	7033.CCL.963	Layanan Operasional Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Unit	10	Progres: 48.70%
4	7033.FAB.963	Sistem Pendukung Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Sistem Informasi	1	Progres: 50%

Rata-rata progres Rincian Output (RO) Pusat Data Dan Informasi pada bulan Juni 2025 adalah 49,68%.

## 3. Komponen

Rata-rata progres komponen Pusat Data Dan Informasi pada bulan Juni 2025 adalah 49,60%.

### B. Capaian Kinerja Anggaran

Berdasarkan DIPA awal LKPP TA 2025, pagu anggaran Pusdatin TA 2025 adalah sebesar Rp9.118.948.000 Berdasarkan aplikasi MonSAKTI Kementerian Keuangan sampai dengan Juni 2025 (kumulatif). Penyerapan per jenis belanja pada Pusdatin sebagai berikut:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase	Sisa Anggaran
51 Belanja Pegawai	-	-	-	-
52 Belanja Barang	7.742.163.000	1.405.529.027	18.15%	6.336.633.973
53 Belanja Modal	1.376.785.000	-	-	1.376.785.000
<b>Total</b>	<b>9.118.948.000</b>	<b>1.405.529.027</b>	<b>15.41%</b>	<b>7.713.418.973</b>

### C. Catatan Monitoring dan Evaluasi

Beberapa catatan pada Pusdatin di bulan Juni 2025 adalah sebagai berikut:

1. Pada bulan Juni 2025, realisasi anggaran parsial sebesar Rp16.037.600,-. Realisasi ini lebih kecil dari Rencana Penarikan Dana (RPD) sebesar Rp88.557.300,- sehingga memiliki deviasi sebesar (-)Rp72.519.700,- atau (-)81,89%.
2. Berdasarkan revisi anggaran ke-7, terdapat anggaran blokir efisiensi pada Pusdatin sebesar Rp6.192.894.000 atau 67,91% dari pagu awal.

---

## D. Rekomendasi

---

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran pada setiap Unit Organisasi.
2. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
3. Pimpinan unit organisasi agar melakukan pemantauan terhadap capaian dan/atau realisasi atas indikator Sasaran Kegiatan, Rincian Output, dan komponen agar seluruh target dapat tercapai tepat waktu.

## BAB III KESIMPULAN

### A. Kesimpulan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi periode bulan Juni 2025, dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pada pelaporan bulan Juni 2025, kinerja LKPP pada level Sasaran Strategis, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Rincian Output berpedoman pada Keputusan Kepala LKPP Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja LKPP Tahun 2025.
2. Pada tahun 2025, LKPP mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp166.711.994.000 dan sampai dengan bulan Juni 2025 penyerapan LKPP (kumulatif) adalah sebesar Rp56.564.597.231 (33.93%) yang terdiri dari:

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi		Sisa Anggaran (Rp)
		Nominal (Rp)	%	
51 Belanja Pegawai	65.901.318.000	36.245.232.693	55%	29.656.085.307
52 Belanja Barang	98.714.391.000	20.254.290.788	20.52%	78.460.100.212
53 Belanja Modal	2.096.285.000	65.073.750	3.1%	2.031.211.250
<b>TOTAL</b>	<b>166.711.994.000</b>	<b>56.564.597.231</b>	<b>33.93%</b>	<b>110.147.396.769</b>

3. Sesuai dengan amanat Inpres Nomor 1 Tahun 2025 terkait Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025 beserta rincian nilai efisiensi anggaran yang disampaikan oleh Kementerian Keuangan bahwa nilai efisiensi anggaran LKPP adalah Rp49,578 M atau 29,75% dari pagu awal LKPP pada tahun 2025. Untuk mengoptimalkan anggaran dan mendukung pencapaian target saat ini LKPP telah mengajukan permohonan relaksasi anggaran blokir efisiensi pada DIPA LKPP TA. 2025 ke Kementerian Keuangan sebesar Rp34.696.548.000.
4. Nilai IKPA LKPP bulan Juni 2025 berdasarkan Aplikasi OMSPAN ([spanint.kemenkeu.go.id](http://spanint.kemenkeu.go.id)) adalah sebesar 96,95.
5. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor No. 107 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran Serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, mulai tahun 2024 pelaporan capaian Indikator Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program (IKP) yang menjadi salah satu komponen penilaian pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran hanya dilaporkan setiap akhir tahun melalui aplikasi SAKTI Kementerian Keuangan, oleh karena itu NKA LKPP belum dapat disajikan pada laporan bulanan ini.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan hasil Laporan Monitoring dan Evaluasi Periode Juni 2025, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan yaitu:

1. Melakukan penyesuaian pelaksanaan aktivitas/kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran belanja pada setiap Unit Organisasi.
2. Melakukan penyesuaian target kinerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran kepada Biro Perencanaan dan Keuangan.
3. Menyusun Rencana Penarikan Dana (RPD) untuk Triwulan III s.d Triwulan IV dengan menyesuaikan rencana kegiatan dan kemampuan dalam penyerapan anggaran agar deviasi antara RPD dengan realisasi anggaran masih dalam batas toleransi sebesar ( $\pm 5\%$ ).
4. Dalam rangka menindaklanjuti hasil evaluasi SAKIP Tahun 2024 dari Kementerian PANRB, setiap unit organisasi agar: mengoptimalkan aplikasi SiREMON dan menumbuhkan rasa kepemilikan kinerja pada setiap pimpinan baik level lembaga maupun seluruh unit/ satuan kerja dengan mendorong pemanfaatan fitur “arahan dan diskusi”.
5. Pimpinan dapat memberikan *feedback*/rekomendasi langkah strategis yang perlu dilakukan atas permasalahan yang muncul dalam upaya pelaksanaan kinerja oleh unit organisasi sebagai bentuk pelaksanaan dialog kinerja yang didokumentasikan, sehingga unit organisasi mendapat arahan yang jelas dan dapat merumuskan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan sesuai arahan pimpinan untuk mengatasi permasalahan dan mendorong pencapaian kinerja.
6. PIC Pelaporan setiap unit organisasi agar melaporkan capaian kinerja dan anggaran serta bukti dukung pada aplikasi SiREMON secara berkala.

